

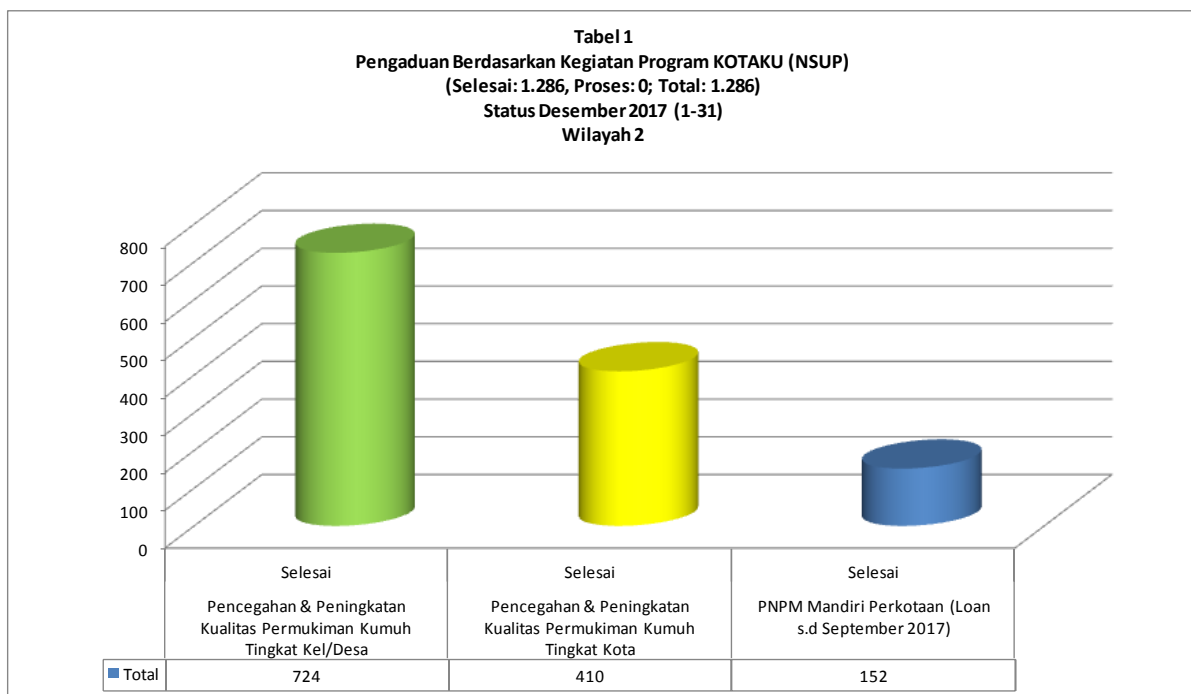
**Progres PPM Program KOTAKU (NSUP)
(Kota Tanpa Kumuh)
Periode Desember 2017
Wilayah 2
(OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9)**

Pendahuluan

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2. Adapun dalam mengelola data hasil PPM ini menggunakan manual Ms. Excel, karena aplikasi SIM PPM direncanakan ke depan berbasis on-line dan segera diluncurkan.

Pada bulan Desember 2017, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 (dua) berjumlah 1.286 pengaduan (selesai 1.286 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Progres pengaduan di bulan Desember 2017 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan

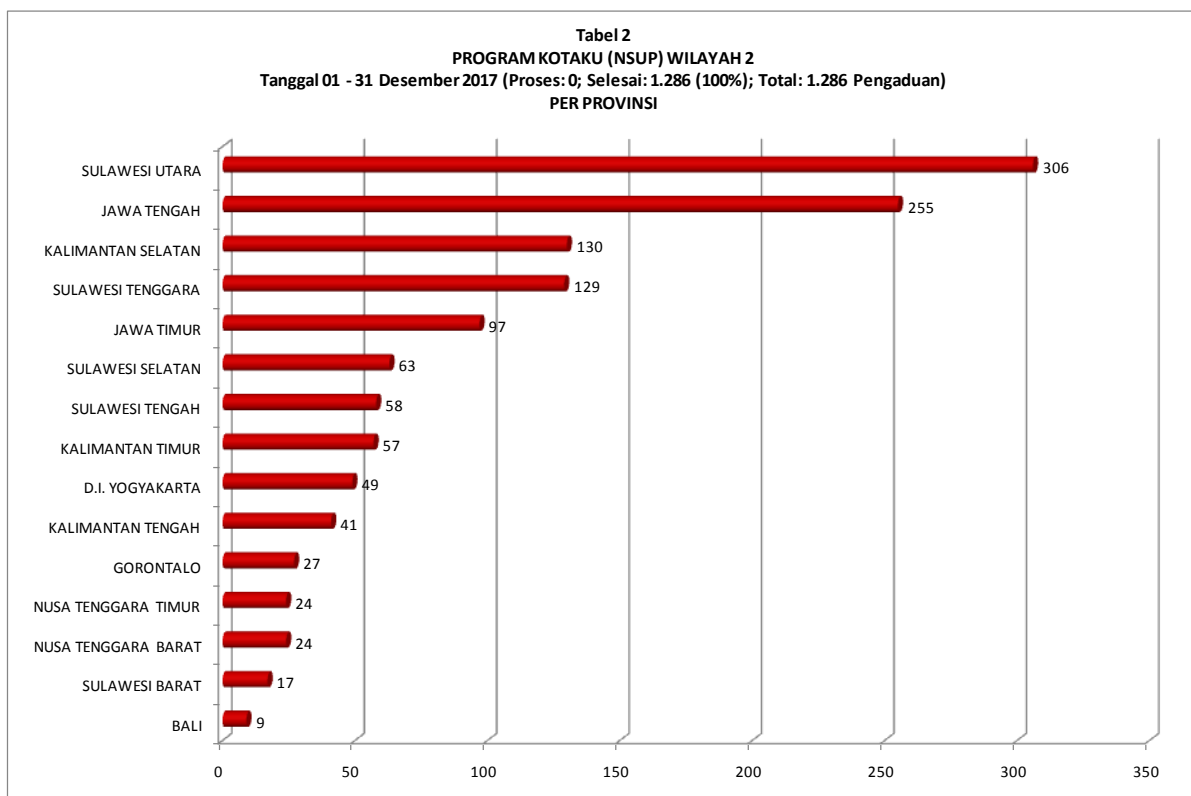


kumuh tingkat kota yang didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (153 pengaduan) dan Provinsi Jawa Tengah (84 pengaduan). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 1a.

Tabel 1a		JENIS KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2														
	BAL	DYOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TIMUR	NUSANTENGAH BARAT	NUSANTENGAH TIMUR	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total	
☒ Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kel/Desa	9	17	22	149	55	53	31	36	14	16	10	47	42	105	118	724
Selesai	9	17	22	149	55	53	31	36	14	16	10	47	42	105	118	724
☒ Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kota	24	1	84	28	27	1	20	10	8	5	16	16	17	153	410	
Selesai	24	1	84	28	27	1	20	10	8	5	16	16	17	153	410	
☒ PNPM Mandiri Perkotaan (Loan s.d September 2017)		8	4	22	14	50	9	1			2			7	35	152
Selesai		8	4	22	14	50	9	1			2			7	35	152
Grand Total	9	49	27	255	97	130	41	57	24	24	17	63	58	129	306	1286

Untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa yang paling banyak diadukan adalah mengenai penyusunan & dokumen perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM (144 pengaduan atau 19,9%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pecegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang paling banyak diadukan adalah mengenai pelaksanaan sosialisasi awal (Kel/Desa, Kab/Kota, dan Provinsi) (160 pengaduan atau 39%), dan untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang banyak diadukan adalah pelaksanaan kegiatan pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (71 pengaduan atau 46,7%).

Dari tanggal 01 s/d 31 Desember 2017. Pengaduan yang terjadi dari tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 1.286 pengaduan (selesai 1.286 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).



Pada tabel 2 terlihat bahwa belum seluruh Provinsi ada pengaduannya yang terjadi dari tanggal 01 sampai 31 Desember 2017. Adapun Provinsi tersebut terdiri atas: Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

A. Progres PPM di program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2

Periode Desember 2017

1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 yang terjadi pada tanggal 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2017, total pengaduan yang telah dikelola berjumlah 1.286 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai sejumlah 1.286 (100%) pengaduan dan status proses sejumlah 0 (0%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif sejumlah 1.271 (98,8%) [selesai 1.271 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 15 (1,2%) [selesai 15 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan.

Tabel 3

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan (Informatif & Masalah) PROGRAM KOTAKU (NSUP) Wilayah 2 01 Desember 2017 - 31 Desember 2017				
INFORMATIF				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Kritik	92	-	92
2	Saran	63	-	63
3	Pertanyaan	1.116	-	1.116
Sub Total		1.271	-	1.271
MASALAH				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Mekanisme & Prosedur	2	-	2
2	Penyimpangan Dana	2	-	2
3	Intervensi Negatif	-	-	-
4	Perubahan Kebijakan	5	-	5
5	Kode Etik	4	-	4
6	Force Majeur	2	-	2
Sub Total		15	-	15
TOTAL		1.286	-	1.286
Persentase		100,0%	0,0%	

Sumber: Data SIM PPM 31 Desember 2017

Perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Desember – 31 Desember 2017 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 12,9% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%. (Lihat tabel 4)

Tabel 4
Perbandingan Jumlah Kelurahan Dengan Jumlah Pengaduan
Periode 01 - 31 Desember 2017 Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

Provinsi	Jml Kel	Jml	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
Jawa Tengah	1.983	255	12,9	255	100,0	-	-
DI Yogyakarta	178	49	28	49	100,0	-	-
Jawa Timur	1.857	97	5	97	100,0	-	-
Bali	130	9	7	9	100,0	-	-
Nusa Tenggara Barat	219	24	11	24	100,0	-	-
Nusa Tenggara Timur	130	24	18	24	100,0	-	-
Kalimantan Tengah	41	41	100	41	100,0	-	-
Kalimantan Selatan	239	130	54	130	100,0	-	-
Kalimantan Timur	145	57	39	57	100,0	-	-
Sulawesi Utara	307	306	100	306	100,0	-	-
Sulawesi Tengah	58	58	100	58	100,0	-	-
Sulawesi Selatan	321	63	20	63	100,0	-	-
Sulawesi Tenggara	129	129	100	129	100,0	-	-
Gorontalo	73	27	37	27	100,0	-	-
Sulawesi Barat	17	17	100	17	100,0	-	-
Maluku	84	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	152	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	41	-	-	-	0,0	-	-
Papua	39	-	-	-	0,0	-	-
Total	6.143	1.286	21	1.286	100,0	0	0,0

Adapun rata-rata pengaduan PROGRAM KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2 periode 01 – 31 Desember 2017 sebesar 21%.

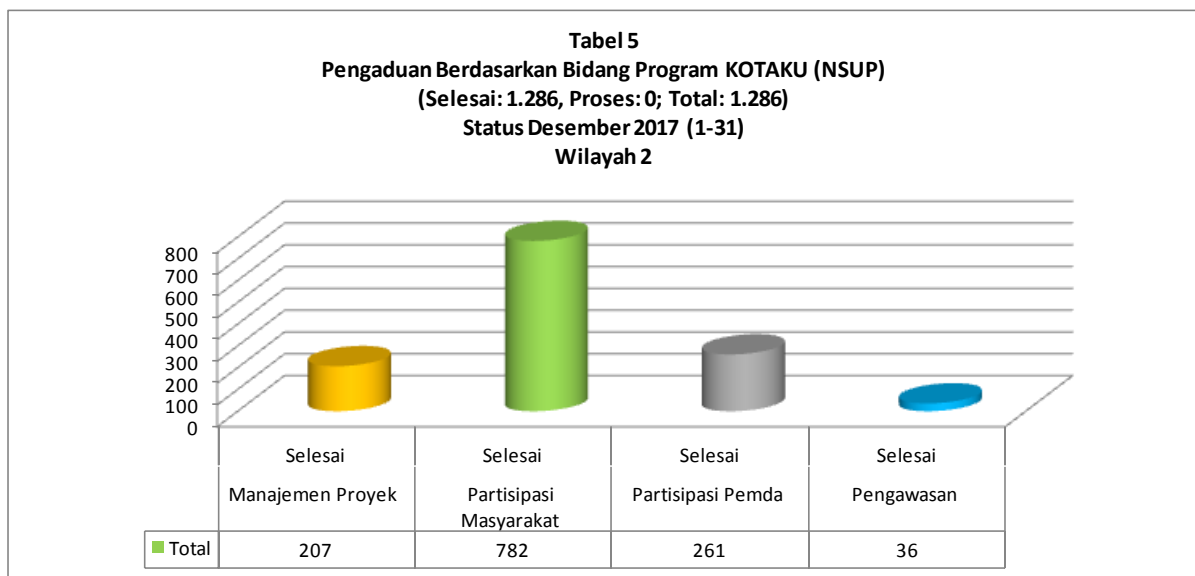
Sedangkan provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 4 adalah Jawa Timur (5%), Bali (7%), Maluku (0%), dan Maluku Utara (0%), Papua Barat (0%), dan Papua (0%).

Secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Desember 2017 jumlah pengaduan yang masuk ada 1.286 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 100%.

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) pengawasan, (2) manajemen proyek, (3) partisipasi Pemda, dan (4) partisipasi masyarakat. Bidang pengaduan tersebut tercakup dalam lingkup administrasi teknis dan keuangan. Adapun lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). termasuk administrasi penyaluran BDI (bantuan dana investasi). Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pembayaran dan pemanfaatan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) di wilayah masing-masing.

Pada tabel 5 untuk pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 207 pengaduan (selesai 207 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 782 pengaduan (selesai 782 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 261 pengaduan (selesai 261 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 36 pengaduan (selesai 36 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).



Selengkapnya lihat tabel 5a per provinsi.

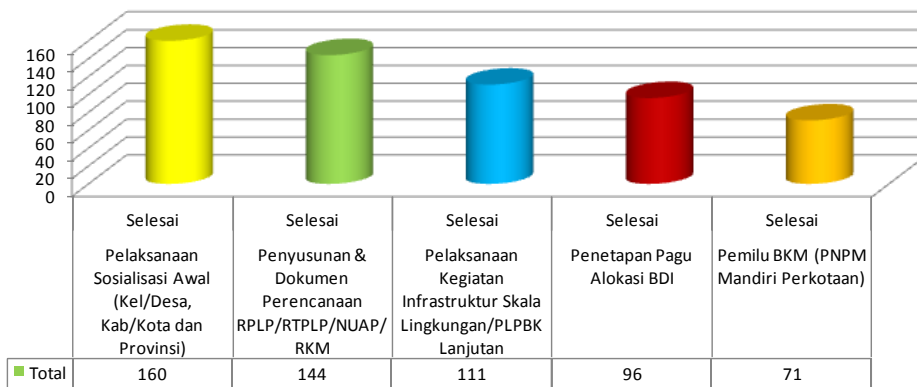
Tabel 5a BIDANG/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	B A L I	D · I · Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l
<input type="checkbox"/> Manajemen Proyek	3	11	7	48	17	17		10	7	3		17	20	13	34	207
Selesai	3	11	7	48	17	17		10	7	3		17	20	13	34	207
<input type="checkbox"/> Partisipasi Masyarakat	6	22	20	164	59	90	40	37	10	16	12	32	30	106	138	782
Selesai	6	22	20	164	59	90	40	37	10	16	12	32	30	106	138	782
<input type="checkbox"/> Partisipasi Pemda		13		40	13	15	1	9	7	5	5	4	8	7	134	261
Selesai		13		40	13	15	1	9	7	5	5	4	8	7	134	261
<input type="checkbox"/> Pengawasan		3		3	8	8		1				10		3		36
Selesai		3		3	8	8		1				10		3		36
Grand Total	9	49	27	255	97	130	41	57	24	24	17	63	58	129	306	1286

3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan

Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut **harus** dimasukkan dalam format manual PPM berbasis Ms. Excel. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, dan force majeure.

Berdasarkan data pada bulan Desember 2017 untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif dengan 5 (lima) tema pengaduan dominan sebanyak 582 pengaduan dan tema lainnya sebanyak 689 pengaduan (total 1.271 pengaduan). Lihat tabel 6.

Tabel 6
5 (lima) tema Pengaduan Dominan Berdasarkan Sifat Aduan *Informatif* dan Sub Bidang Sebanyak 582 Pengaduan dan Tema Lainnya sebanyak 689 pengaduan total 1.271 pengaduan
Tanggal 01 s.d 31 Desember 2017
Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

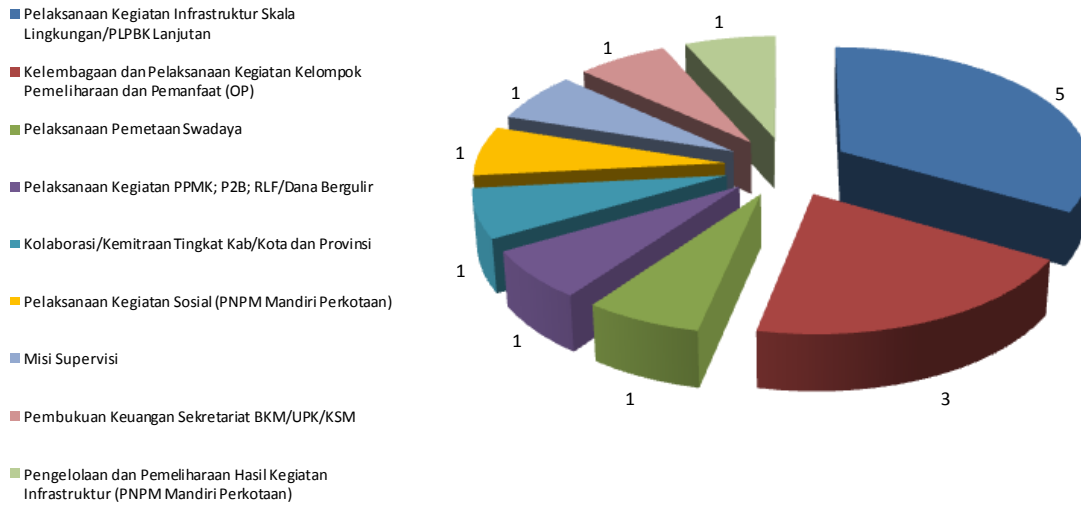


Selengkapnya lihat tabel 6a per provinsi.

INFORMATIF/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	B	D	G	J	J	K	K	K	N	N	S	S	S	S	S	S	G	r	a	n	d	T	o	t	a	l	
																											B
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8		26	6	2				1		3		1	113	160											
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1		24	8	8	3	4	2	1		9	6	21	57	144												
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	7	6	5	12	4	12	5	3	6	7	17		10	16	111											
Penetapan Pagu Alokasi BDI		3	1	34	11	10		9	2	1		11	3	7	4	96											
Pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan)		4	2	1	1	36	2							7	18	71											
Grand Total	2	22	9	90	38	60	17	18	7	9	7	40	9	46	208	582											

Pada kategori yang bersifat masalah pada bulan Desember 2017 pengaduan sebanyak 15 pengaduan (selesai 15 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Lihat tabel 7.

Tabel 7
Pengaduan Berdasarkan Sifat Aduan *Masalah* dan Sub Bidang
total 15 pengaduan
Tanggal 01 s.d 31 Desember 2017
Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2



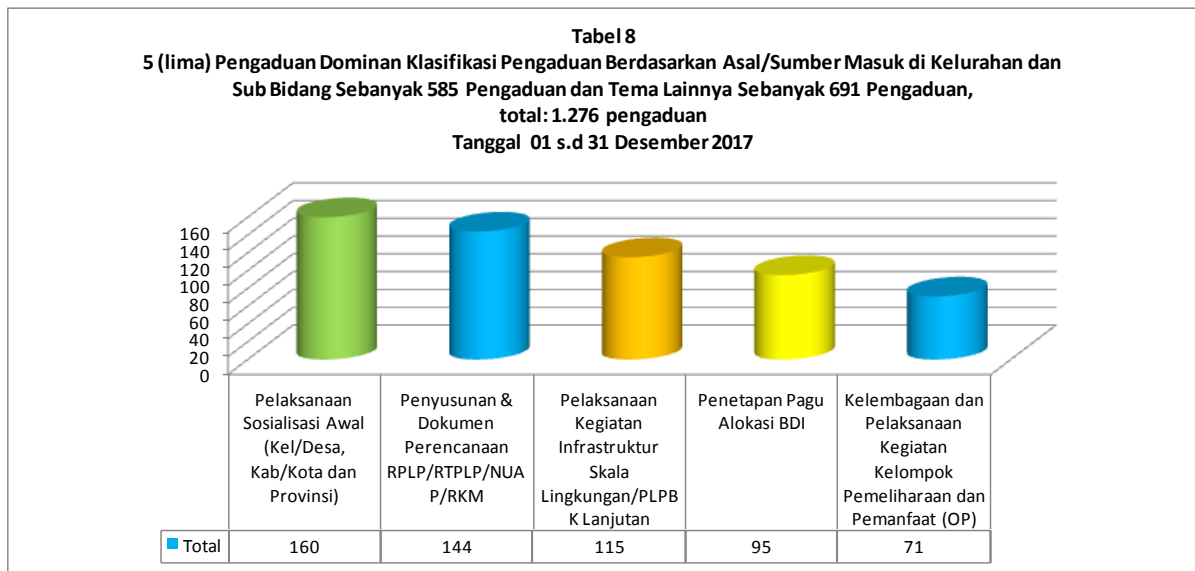
Selengkapnya lihat tabel 7a per provinsi.

MASALAH/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	JAWA	JAWA	KALI	NUSA	SULAWESI	Grand
	TENGAH	TIMUR	MANTARA	TENGAH	TENGAH	Total
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan		1		1	3	5
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat (OP)			3			3
Pelaksanaan Pemetaan Swadaya	1					1
Pelaksanaan Kegiatan PPMK; P2B; RLF/Dana Bergulir			1			1
Kolaborasi/Kemitraan Tingkat Kab/Kota dan Provinsi	1					1
Pelaksanaan Kegiatan Sosial (PNPM Mandiri Perkotaan)	1					1
Misi Supervisi	1					1
Pembukuan Keuangan Sekretariat BKM/UPK/KSM					1	1
Pengelolaan dan Pemeliharaan Hasil Kegiatan Infrastruktur (PNPM Mandiri Perkotaan)	1					1
Grand Total	5	1	4	1	4	15

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan pada bulan Desember 2017 dengan 5 (lima) pengaduan dominan ada 585 pengaduan dan tema lainnya ada 691 pengaduan (total selesai 1.276 pengaduan).



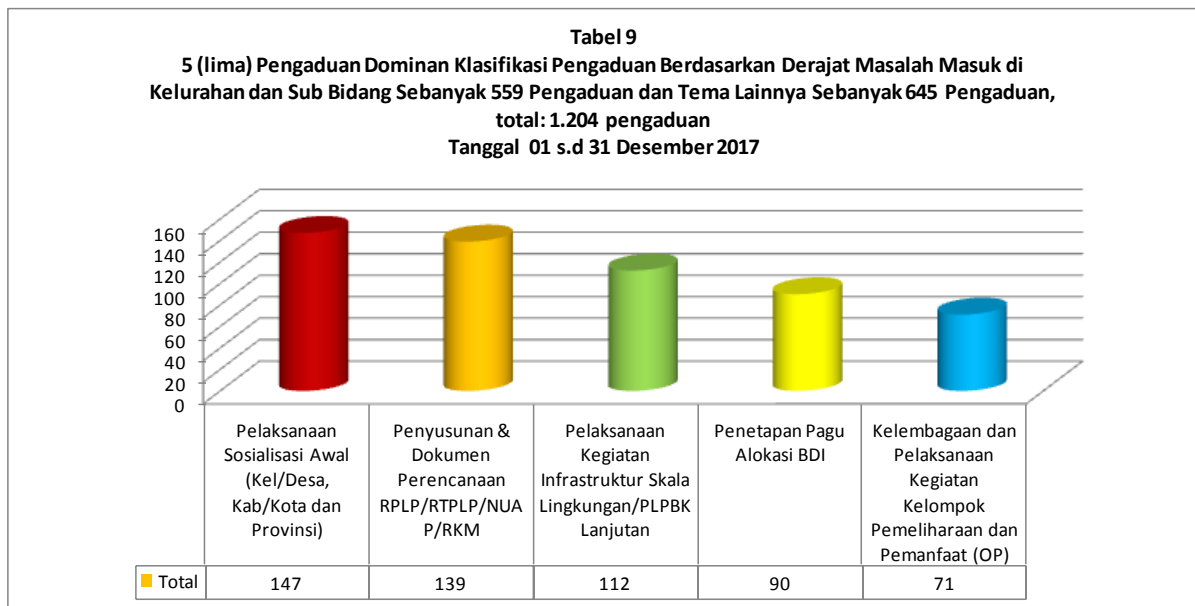
Selengkapnya lihat tabel 8a per provinsi.

Tabel 8a	SUMBER ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2														Grand Total	
	BAL	D I Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A		
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8		26	6	2				1		3		1	113	160
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1			24	8	8	3	4	2	1		9	6	21	57	144
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan	1	7	6	5	13	4	12	5	3	6	7	17	3	10	16	115
Penetapan Pagu Alokasi BDI		3	1	34	11	10		8	2	1		11	3	7	4	95
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat (OP)		2		1	2	3		3		3		1	11	45		71
Grand Total	2	20	7	90	40	27	15	20	7	12	7	41	23	84	190	585

5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat.

Pada bulan Desember 2017 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan dengan 5 (lima) pengaduan dominan sejumlah 559 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 645 pengaduan (total 1.204 pengaduan).



Tabel 9a di bawah berdasarkan per provinsi.

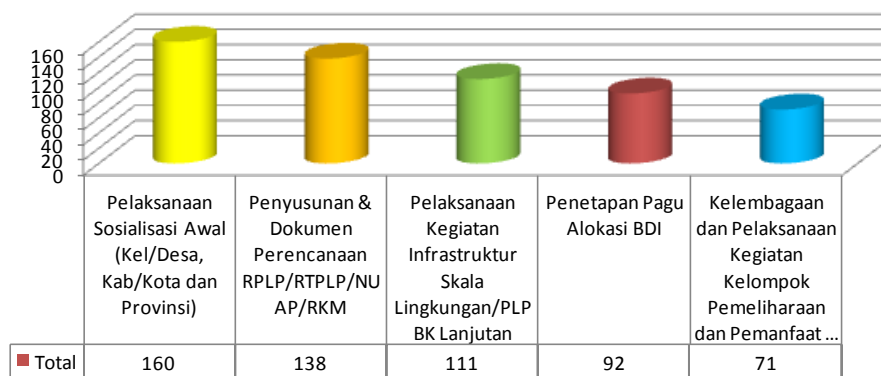
DERAJAT/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	B	D	G	J	J	K	K	K	N	N	S	S	S	S	S	S	G
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8		26	6	2				1		3			1	100	147
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1		24	8	8	3	4	2	1		9	6	21	52		139	
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	7	6	5	13	4	10	5	3	7	7	17	3	10	14	112	
Penetapan Pagu Alokasi BDI		3	1	33	11	10		8		1		11	3	7	2	90	
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat (OP)		2		1	2	3		3		3		1	11	45		71	
Grand Total	2	20	7	89	40	27	13	20	5	13	7	41	23	84	168	559	

6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan tigabelas media untuk mengadu, media tersebut terdiri atas: Tatap Langsung, Buku Pengaduan, Kotak Pengaduan, Telepon, SMS, Faksimil, Surat, Email, Pengaduan On-Line, Kunjungan Lapangan/Supervisi, Facebook, Twitter, dan Instagram.

Berdasarkan data pada bulan Desember 2017 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung/muka dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 572 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 672 pengaduan (total 1.244 pengaduan).

Tabel 10
5 (lima) Pengaduan Dominan Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Aduan (Tatap Langsung)
dan Sub Bidang Sebanyak 572 Pengaduan dan Tema Lainnya Sebanyak 672 Pengaduan, total:
1.244 pengaduan
Tanggal 01 s.d 31 Desember 2017



Tabel 10a di bawah berdasarkan per provinsi.

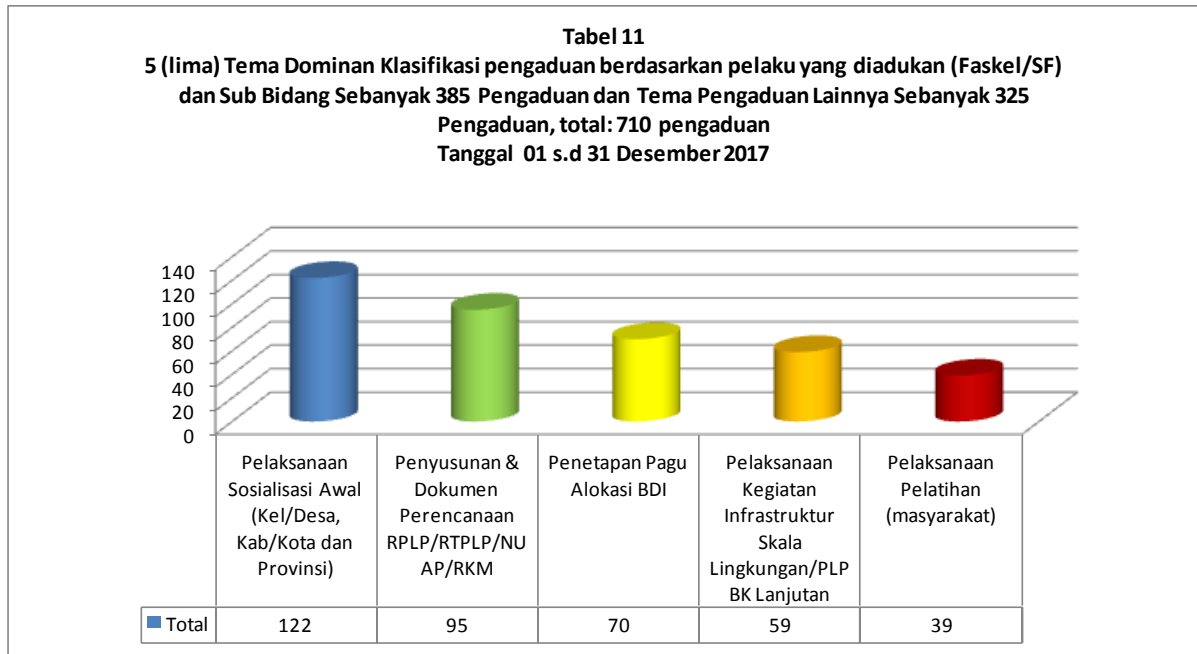
MEDIA ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Grand Total																
	BALI	D I YOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	NUSABARAT	NUSABARAT	NUSABARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA		
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8		26	6	2				1		3			1	113	160
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1			24	8	8	3	4	2	1		9	6	21	51	138	
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	7	6	5	12	4	10	5	3	7	7	17	3	10	14	111	
Penetapan Pagu Alokasi BDI		3	1	34	11	10		5	2	1		11	3	7	4	92	
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat (OP)		2		1	2	3		3		3		1	11	45		71	
Grand Total	2	20	7	90	39	27	13	17	7	13	7	41	23	84	182	572	

7. Pengaduan Berdasarkan Pelaku Yang Diadukan

Untuk mengetahui pelaku yang diadukan terdapat 9 pilihan terdiri atas: KSM, BKM/LKM, Aparat Kelurahan/Kecamatan, Aparat Kabupaten/Kota/Provinsi, Faskel/SF, Korkot, KMW/OC/OSP, KMP/Proyek, dan Kontraktor/Jasa Konsultan.

Berdasarkan data pada bulan Desember 2017 pengaduan yang paling banyak berdasarkan pelaku yang diadukan adalah Fasilitator Kelurahan/Senior Fasilitator

(Faskel/SF) dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 385 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 325 pengaduan (total 710 pengaduan).



Tabel 11a di bawah berdasarkan per provinsi.

Tabel 11A

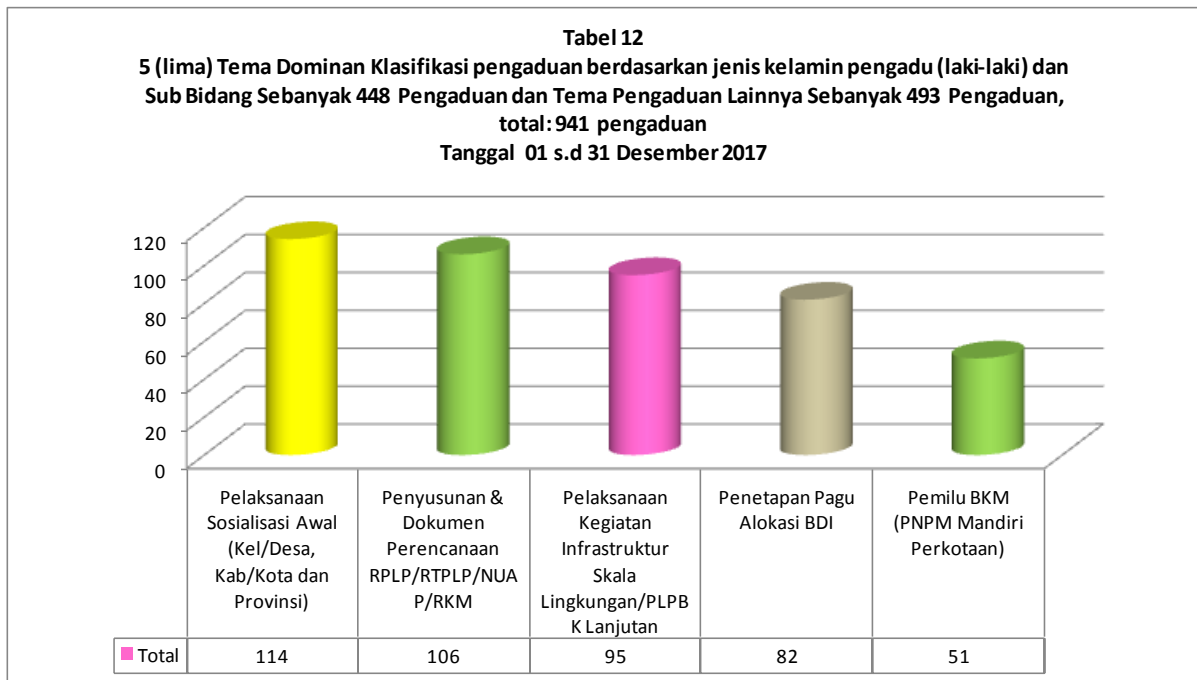
PELAKU YANG DIADUKAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2

	B	D	J	J	K	K	K	N	N	S	S	S	S	G	
	A	I	A	A	A	A	A	U	U	S	S	S	S	r	
	L	Y	W	W	L	L	L	S	S	S	S	S	S	a	
	I	O	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	A	n	
		G	T	T	M	M	M	T	T	S	S	S	S	d	
		A	E	E	T										
		K	N	N	T										
		A	G	G	T										
		R	A	A	a										
		T	R	R	i										
		A	A	A											
			H	H											
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8	19	4	1					3				87	122
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1		21	3	6	1		2		4	3	18	36	95	
Penetapan Pagu Alokasi BDI		3	28	6	7		7	2		10	1	4	2	70	
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan	1	7	4	8		4	1	3	1	10	1	3	16	59	
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	3		4	2	1			3		3	7	1	15	39	
Grand Total	5	18	76	23	15	5	8	10	1	30	12	26	156	385	

8. Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk pengaduan berdasarkan jenis kelamin terdapat 3 pilihan terdiri atas: Laki-laki, Perempuan, dan Tidak diketahui.

Berdasarkan data pada bulan Desember 2017 pengaduan berdasarkan jenis kelamin pengadu adalah Laki-laki dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 448 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 493 pengaduan (total 941 pengaduan).



Tabel 12a di bawah berdasarkan per provinsi.

JENIS KELAMIN PENGADU/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU WILAYAH 2	Tabel 12A													Grand Total	
	BALIK NEGERI	D I Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N	N U S A T E N G G A R A	N U S A T E N G G A R A	S U L A W E S I	S U L A W E S I	S U L A W E S I		
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		5	24	6	2				1		2		1	73	114
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1		22	8	6	3	3	1	1		9	5	15	32	106
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan	1	5	4	3	13	4	10	5	2	7	7	14	3	8	95
Penetapan Pagu Alokasi BDI		2	33	10	9			5		1		9	3	6	82
Pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan)		4	1	1	28	2							4	11	51
Grand Total	2	16	4	83	38	49	15	13	3	10	7	34	11	34	448

Penutup

Dalam laporan bulan Desember 2017 ini dapat disampaikan bahwa Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2 (dua) berjumlah 1.286 pengaduan (selesai 1.286 (100%), proses 0 (0%) pengaduan), sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan & peningkatan kumuh tingkat kota pengaduannya didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (153 pengaduan) dan Provinsi Jawa Tengah (84 pengaduan).

Adapun untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa yang paling banyak diadakan adalah mengenai penyusunan & dokumen perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM (144 pengaduan atau 19,9%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang paling banyak diadakan adalah mengenai pelaksanaan sosialisasi awal (Kel/Desa, Kab/Kota, dan Provinsi) (160 pengaduan atau 39%), dan untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang banyak diadakan adalah pelaksanaan kegiatan pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (71 pengaduan atau 46,7%).

Sedangkan mengenai pengaduan yang bersifat informatif sejumlah 1.084 (97,9%) [selesai 1.083 (99,9%), proses 1 (0,1%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 23 (2,1%) [selesai 21 (91,3%), proses 2 (8,7%)] pengaduan.

Bila dilihat dalam perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Desember – 31 Desember 2017 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 12,9% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%.

Sedangkan rata-rata pengaduan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2 periode 01 – 31 Desember 2017 sebesar 21%.

Adapun Provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% adalah Jawa Timur (5%), Bali (7%), Maluku (0%), dan Maluku Utara (0%), Papua Barat (0%), dan Papua (0%).

Untuk secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Desember 2017 jumlah pengaduan yang masuk ada 1.286 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 100%.

Pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 207 pengaduan (selesai 207 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 782 pengaduan (selesai 782 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 261 pengaduan (selesai 261 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 36 pengaduan (selesai 36 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Pada laporan PPM ini belum seluruh Provinsi mengirimkan data pengaduannya. Untuk kenyamanan penginputan data, PPM Pusat berusaha untuk memperbaiki format isian manual PPM agar menjadi lebih mudah dan diupayakan SIM PPM On-Line berbasis website dapat segera dioperasikan.